

## **BAB II**

### **Fenomena Kabut Asap dalam Dinamika Regional di ASEAN**

Fenomena kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi sebagian negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Indonesia yang dianggap aktor utama bencana tersebut juga mengalami kerugian yang lebih besar dan menambah daftar beban ekonomi yang harus dibayarkan oleh negara. Meluasnya bencana kabut asap hingga ke kawasan regional, maka dibutuhkan kerjasama pemerintah multilateral.

*Transboundary Haze Pollution* merupakan penyebaran polusi kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan di suatu wilayah atau negara, dimana kabut asap tersebut melewati lintas batas negara sehingga memasuki wilayah negara lain dan mengganggu aktifitas serta membahayakan kesehatan, lingkungan di wilayah yang terkena kabut asap. Masalah lingkungan ini mengancam hubungan multilateral antara negara penghasil kabut asap dan penerima kabut asap.

#### **A. Kronologis Kebakaran Hutan di Indonesia**

Salah satu peristiwa bencana alam di Indonesia yaitu kebakaran hutan tidak bisa dihilangkan dari catatan sejarah. Kebakaran hutan di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi dan menjadi peristiwa tahunan. Sebagian besar peristiwa tersebut terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki area hutan hijau yang cukup besar, seperti wilayah Kalimantan dan Sumatra. Kedua wilayah tersebut salah satunya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Seperti pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam,

serta pulau Sumatra yang memiliki jarak cukup dekat dengan Singapura . Sehingga ketika kebakaran hutan dalam skala besar terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatra, maka kabut asap akan terbang ke wilayah negara tetangga mengikuti arah angin dan menyelimuti wilayah tersebut.

Posisi negara tetangga yang berbatasan langsung dan memiliki jarak yang cukup dekat dengan wilayah Indonesia yang rawan akan kebakaran hutan berpotensi besar untuk menerima kabut asap. Kabut asap di Indonesia tidak hanya menyebar di wilayah Indonesia, namun telah melewati batas negara.

Secara kronologis kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2005-2010, 2011-2012, serta pertengahan tahun 2013 yang lalu. Implikasi dari bencana tersebut telah menimbulkan banyak kerugian baik dari sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan hubungan multilateral terhadap beberapa negara di ASEAN.

Tahun 1982/1983 terjadi kemarau panjang yang menjadi pemicu kebakaran besar di Kalimantan Timur yang menghancurkan 3,2 juta hektar dengan kerugian mencapai lebih dari 6 trilyun rupiah. Hal tersebut tergambar dari meningkatnya ledakan produksi kayu di Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menjadikan hampir seluruh kawasan dijadikan sebagai HPH (Hak Penguasaan Hutan) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.<sup>25</sup> Pada bulan Juni 1982 juga terjadi fenomena *el nino* yang cukup hebat melanda kawasan provinsi Kalimantan Timur. Kebakaran hutan yang hebat pun terjadi hingga akhir tahun 1983.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, hal.3

<sup>26</sup> *El nino* merupakan gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan laut Samudra Pasifik sekitar khatulistiwa bagian tengah dan timur. Naiknya suhu mengakibatkan

Tidak hanya berhenti sampai di tahun itu, tahun 1994 terjadi kemarau panjang yang melanda Indonesia. Tercatat terjadi kebakaran besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. BAPPENAS mencatat terjadinya kebakaran hutan dengan luasan 500.000 Ha pada tahun 1991 dan lebih dari 5 juta hektar pada tahun 1994 (BAPPENAS, 1999 dalam FWI, 2001). Bencana asap melanda sampai Malaysia dan Singapura pada akhir bulan September yang kemudian mendasari beberapa project dan kerjasama Internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.<sup>27</sup>

Tahun 1997-1998 merupakan periode awal terjadinya bencana kebakaran hutan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan iklim El Nino dalam tingkat tinggi yang terus melanda Indonesia pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dalam jumlah yang besar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada awal tahun 1998 Indonesia telah kehilangan kawasan hutannya sebanyak 10 juta hektar.<sup>28</sup> Perkembangan kebakaran tersebut juga memperlihatkan terjadinya perluasan penyebaran lokasi kebakaran yang terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia, serta tidak hanya di kawasan hutan tetapi juga di lahan non hutan.

Pembakaran hutan ini mengakibatkan kurang lebih 20 juta orang di Asia Tenggara menghirup gas berbahaya yang terkandung dalam asap. Perhitungan

---

perubahan pola angin dan curah hujan yang ada di atasnya. Pada saat normal, hujan banyak turun

di Australia dan Indonesia. Akibat el nino, hujan banyak turun di Samudra Pasifik sedangkan Australia dan Indonesia menjadi kering.

<sup>27</sup> *Op.cit.*, Sejarah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.

<sup>28</sup> *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, hal.3

secara ekonomi menunjukkan dampak kebakaran hutan tahun 1997 dan 1998 menunjukkan kisaran angka US\$4,5 milyar hingga US\$ 9,3 milyar.<sup>29</sup>

Kebakaran hutan berlanjut pada tahun 2007-2009, hal ini dikarenakan mulai terjadinya musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia. Dimulai dari bulan Februari sampai dengan 15 Juli jumlah titik panas sudah mencapai 2.981 secara nasional. Titik panas tersebut pada umumnya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, dimana jumlah titik panas terbesar terdapat di Provinsi Riau. Provinsi lainnya yang memiliki jumlah titik panas yang besar berturut-turut adalah Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.<sup>30</sup>

Kebakaran hutan pada tahun 2011 terjadi antara bulan Januari hingga Juli. Kawasan yang mengalami kebakaran lebih banyak di daerah-daerah perkebunan masyarakat yaitu sebesar 71%, sementara kawasan hutan yang terbakar hanya sebesar 23 % hal ini dikarenakan ulah dari para perambah hutan yang melakukan kegiatan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.<sup>31</sup> Kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad, karena dampaknya bagi hutan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkannya sangat besar.<sup>32</sup>

Pertengahan tahun 2013, Indonesia muncul kembali dengan berita kebakaran hutan yang juga menjadi persoalan di regional. Mayoritas kebakaran

---

<sup>29</sup> *Op.cit.*, Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, hal.2

<sup>30</sup> *Op.cit.*, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, hal.4

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Luca Tacconi, Kebakaran hutan di Indonesia : Penyebab , Biaya, dan Implikasi Kebijakan, [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-038i.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2014

hutan terjadi di Riau. Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya mengganggu warga Riau, namun telah masuk ke dalam wilayah negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Selama bulan Juni 2013, mayoritas kebakaran yang terjadi terpusat di Provinsi Riau, Pulau Sumatera, Indonesia. Angka yang cukup mengejutkan, yaitu sebanyak 87 persen dari peringatan titik api di sepanjang Sumatera pada 4-11 Maret 2014 berada di Provinsi Riau. Hampir di setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan akibat sebagian besar lahan di Sumatra dan Kalimantan berupa lahan gambut yang mudah terbakar saat cuaca panas. Kasus ini sangat memprihatinkan mengingat hampir setiap tahun Indonesia harus mengalami hal yang sama yaitu bencana kabut asap. Dibutuhkan tindakan yang tepat dan serius dari pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi.

Kabut asap yang tebal kembali menyelimuti daerah Riau dan Kalimantan Barat terjadi lagi di tahun 2014 sejak bulan Februari yang menyesakkan ribuan warga di kedua wilayah tersebut. Berita terakhir dari BBC Indonesia mengatakan bahwa situasi kabut asap di Riau saat ini masih terjadi dan kepekatan kabut asap telah mengancam gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) terhadap warga juga masih tinggi.<sup>33</sup> Kerugian ekonomi yang dialami oleh Indonesia mencapai hampir Rp 15 triliun.

---

<sup>33</sup> Kabut Asap Masih Selimuti Sebagian Riau,  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/03/140303\\_kabutasap.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140303_kabutasap.shtml) diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap perlu ditanggulangi secara tepat dan serius sebab masalah ini memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya.

## **B. Kabut Asap Sebagai Masalah Domestik di Indonesia**

Demi kepentingan pribadi dan keuntungan yang hendak diraih menjadikan alam sebagai korban dan pada akhirnya ketika alam rusak maka manusia lah yang menanggung resiko yang terjadi. Tak terkecuali kasus kabut asap. Kasus ini merupakan hasil dari tangan-tangan oknum yang tak bertanggung jawab sehingga pada akhirnya efek buruk akibat merusak alam pun menjadi sebuah bencana yang harus dialami oleh masyarakat setiap tahun.

Kasus kabut asap di Indonesia bukanlah fenomena baru. Kasus ini dinilai semakin intensif sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah *hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*.<sup>34</sup>

Dengan diberikannya sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah provinsi oleh pemerintah pusat, bisa menjadi sebuah langkah yang dilematis jika dilihat dari segi pelaksanaannya.<sup>35</sup> Di satu sisi tugas pemerintah pusat akan lebih ringan karena beban tugas mereka dibantu oleh pemerintah daerah. Namun di sisi

<sup>34</sup> Pengertian otonomi daerah, <http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>35</sup> Semangat Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan pro Lingkungan Hutan <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2014/03/13/semangat-otonomi-daerah-dalam-penyelenggaraan-kebijakan-pro-lingkungan-hutan-638208.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

lain akan menjadi sebuah celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan tersebut demi kepentingan pribadi. Sehingga memungkinkan fenomena kejahatan terhadap hutan di daerah akan semakin menjamur dengan terlepasnya urusan birokrasi dari pemerintah pusat.

Kasus kebakaran hutan semakin meningkat setiap tahunnya. Kasus ini menguat terkait dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan yang diberikan ke masing-masing daerah. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Selain desentralisasi, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dalam skala kebijakan nasional telah berkomitmen untuk memberantas pemabalakan liar, menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, restrukturisasi industri kehutanan, menilai hasil sumber daya kehutanan, penanganan land tenure, serta rekalkulasi tegakan.<sup>36</sup>

Pemerintah selaku aktor utama dalam mengelola sumber daya alam berperan penting menjaga kelestarian hutan. Mengingat lajunya deforestasi yang terjadi setiap tahun, tanggung jawab pemerintah selama ini pun mulai dipertanyakan. Sistem otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah, justru menjadi sebuah dilema bagi keberlangsungan hutan hijau di setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam hutan membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan swasta maupun asing untuk mendapatkan izin mendirikan perusahaan mereka dengan lebih mudah yang berujung pada eksploitasi jutaan hektar hutan di Indonesia. Kebakaran hutan yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

semakin tidak terkontrol merupakan bentuk lemahnya peraturan daerah mengenai perlindungan hutan.

Hal ini diperkuat dengan keterlibatan beberapa perusahaan kertas dan sawit yang dijadikan tersangka atas kasus pembakaran hutan secara sengaja demi kepentingan pribadi . Seperti yang dikutip oleh Liputan6<sup>37</sup>, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan bukti kuat keterlibatan 23 perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri dalam pembakaran hutan dan lahan di Riau. Akibat kebakaran hutan tersebut, wilayah Riau dan sekitarnya dilanda kabut asap yang berbahaya.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan atas kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut juga didukung oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, Abetnego Tarigan kepada ANTARA News.<sup>38</sup> Abetnego menyebutkan sekitar 13 perusahaan terlibat dalam pembalakan lahan tersebut sejak 2013 karena lahan yang terbakar di lokasi yang sama.

Dari beberapa perusahaan yang terlibat diantaranya merupakan perusahaan sawit milik Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kambuaya Balthazar. Ada delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau.<sup>39</sup> Perusahaan tersebut antara lain ; PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT

---

<sup>37</sup> Kementerian Lingkunga Hidup : 23 Perusahaan terlibat pembakaran hutan Riau, <http://news.liputan6.com/read/2039717/kementerian-lh-23-perusahaan-terlibat-pembakaran-hutan-riau#sthash.e2kc7bxO.dpuf> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>38</sup> Walhi yakin perusahaan terlibat pembalakan lahan Riau, <http://www.antaranews.com/berita/423512/walhi-yakin-perusahaan-terlibat-pembalakan-lahan-riau> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>39</sup> Singapura : Asap Sumatera, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/06/130621\\_singapura\\_asap\\_sumatera.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130621_singapura_asap_sumatera.shtml) diakses pada tanggal 12 Maret 2014



Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.

Satu dari delapan perusahaan tersebut yang dinyatakan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan di Riau yaitu PT Adei Plantation (PT AP).<sup>40</sup> Perusahaan tersebut menyuruh para pekerjanya untuk membakar lahan perkebunan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan bahwa kasus kebakaran hutan tahun 2014 ini juga melibatkan beberapa perusahaan. Kebanyakan perusahaan asing milik Malaysia dan Singapura.<sup>41</sup> Dari 41 penindakan hukum oleh kepolisian, hampir 23 bahkan 25 sudah tersangka.

Peningkatan jumlah perusahaan kertas dan perkebunan sawit di Indonesia selaras dengan semakin tingginya intensitas kabut asap yang terjadi tiap tahunnya. Lemahnya hukum di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia. Kejahatan terhadap hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab mendatangkan kerugian yang sangat besar baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Selain itu kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan juga memberikan efek buruk bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Dampak langsung yang diakibatkan oleh kebakaran hutan antara lain asap yang berlebihan selama kebakaran dapat menimbulkan berbagai gangguan

---

<sup>40</sup> Polisi Dalam Keterlibatan 8 Perusahaan kasus Kebakaran Lahan Riau, <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/04/1430414/Polisi.Dalami.Keterlibatan.8.Perusahaan.Kasus.Kebakaran.Lahan.Riau> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>41</sup> Pelaku pembakaran hutan berasal dari Malaysia dan Singapura, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/27/pelaku-pembakaran-hutan-berasal-dari-malaysia-singapura> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

kesehatan. Tidak hanya menyerang orang dewasa namun balita dan anak-anak menjadi korban. Selain itu juga mengganggu aktivitas produktif masyarakat seperti bekerja dan sekolah karena pada saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar maka segala aktivitas diluar akan diliburkan. Hal ini juga mengganggu sistem transportasi di darat,laut, maupun udara serta timbulnya permasalahan internasional ketika kabut asap telah mencapai lintas batas negara (transboundary haze pollution) seperti yang dialami oleh Singapura dan Malaysia yang mengalami kerugian baik dari segi materi maupun non materi.

Bencana kabut asap di Indonesia sangat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Hampir setiap tahun jutaan warga Indonesia harus menghirup udara berbahaya tersebut selama beberapa bulan. Ancaman kesehatan merupakan hal terburuk yang harus dialami oleh masyarakat Indonesia.

Tidak hanya sekadar sesak nafas, penyakit yang kemungkinan besar muncul adalah bronkhitis akut, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) yang bisa mengakibatkan gagal nafas dan juga kanker paru. Penjelasan ini disampaikan oleh dr Azizman Saad, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau kepada VOA.<sup>42</sup>

Hampir seluruh kegiatan dan perkantoran serta sekolah diliburkan ketika kabut asap datang menyelimuti beberapa wilayah. Salah satunya di Dumai, Riau.

---

<sup>42</sup> Bencana Asap di Kawasan Riau Berpotensi Picu Kanker Paru dalam 10 Tahun ke Depan, <http://m.voaindonesia.com/a/bencana-asap-di-kawasan-riau-berpotensi-picu-kanker-paru-dalam-10-tahun-ke-depan-/1866432.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Ancaman kabut asap yang sangat membahayakan kesehatan manusia membuat Dinas Pendidikan Kota Dumai, Riau, meliburkan seluruh peserta didik.<sup>43</sup>

Tidak jarang ketika kabut asap mulai menyebar ditemukan bahwa kualitas udara di daerah tersebut dikategorikan berbahaya atau terkadang sudah mencapai kategori sangat berbahaya. Di Pekanbaru, Riau, alat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU<sup>44</sup>) milik PT.Chevron Pasifik Indonesia menyatakan bahwa kualitas udara di sebagian wilayah setempat berada pada 305 polutan standar indeks (PSI). Artinya, kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan.<sup>45</sup> Data alat ISPU tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Riau secara merata mengalami penurunan atau dalam kondisi tidak sehat.

Selain mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk, kabut asap juga menutupi sejumlah daerah di Indonesia. Di Bukittinggi, jarak pandang tidak lebih dari 300 meter. Sedangkan di kota Jambi, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan masih terjadi di sepanjang Sungai Batanghari dengan jarak pandang hanya 50 meter.

Kabut tebal juga mengganggu transportasi darat, laut dan juga udara. Pada saat kebakaran hutan yang cukup besar banyak kasus penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Kabut asap tebal kembali menjadi hambatan jarak

---

<sup>43</sup> <http://www.antaranews.com/berita/380964/pelajar-dumai-diliburkan-karena-kabut-asap-sangatmembahayakan> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>44</sup> Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Lihat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

<sup>45</sup> Udara Riau Berstatus Bahaya, <http://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/13/08/28/ms8ztg-udara-riau-berstatus-bahaya> , diakses pada tanggal 12 Maret 2014

pandang yang berdampak kacaunya jadwal penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebanyak 60 jadwal penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan terganggu akibat kabut asap.<sup>46</sup> Hal ini disebabkan oleh jarak pandang yang hanya berjarak lima ratus meter.

Kekacauan ini ternyata memberikan efek domino terhadap maskapai lainnya. Salah satunya Garuda Indonesia yang harus menunda jadwal penerbangan khususnya untuk penerbangan domestik. Hal ini jelas berpengaruh terhadap penerbangan ke kota lainnya akibat kabut asap di Riau.<sup>47</sup>

Selain itu dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap tebal juga berpengaruh terhadap bisnis pariwisata karena orang enggan untuk liburan akibat cuaca dan kondisi udara yang tidak mendukung dan berbahaya bagi kesehatan. Pembatalan terhadap tiket penerbangan dan hotel sering terjadi saat ada kabut asap. Hal ini dikarenakan faktor keselamatan penerbangan yang banyak terganggu oleh kabut asap. Sementara pada transportasi darat dan laut terjadi beberapa kasus tabrakan atau kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Keselamatan dan kesehatan menjadi hal terpenting bagi masyarakat untuk menghindari kontak langsung dengan kabut asap.

Kasus kabut asap ini awalnya dianggap sebagai masalah domestik bagi Indonesia sehingga Indonesia merasa tidak perlu melibatkan pihak luar untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap di beberapa wilayah provinsi. Namun, seiringnya waktu Indonesia acapkali mendapatkan tekanan dari negara tetangga

<sup>46</sup> <http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=71573>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>47</sup> Garuda Indonesia : Kabut Asap timbulkan efek domino,  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/22/mosdt8-garuda-indonesia-kabut-asap-timbulkan-efek-domino>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

akibat kiriman kabut asap yang datang dari Indonesia hasil dari kebakaran hutan yang melanda setiap tahunnya. Negara-negara tetangga merasa dirugikan dengan keadaan tersebut. Kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan penduduk tetapi juga mengancam stabilitas negara baik segi ekonomi, sosial, dan politik. Akibatnya kasus ini pun berlanjut untuk dibahas ke ranah internasional karena telah melibatkan beberapa negara.

### **C. Kabut Asap Domestik Menjadi Isu Regional**

Kerugian yang dialami Indonesia akibat kabut asap ini menyita perhatian pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap sudah menjadi sebuah teguran kecil atas kekecewaan alam terhadap manusia. Kebakaran hutan di Indonesia terasa sulit untuk dikontrol akibat kurangnya pengawasan terhadap hutan dan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku kejahatan hutan.

Ketika kebakaran hutan sudah tidak bisa dikendalikan lagi maka timbul persoalan baru yang harus dihadapi oleh Indonesia. Kabut asap yang awalnya merupakan masalah domestik kemudian berkembang menjadi isu regional. Perkembangan ini dimulai ketika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melanda Provinsi Riau dan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Kabut asap juga melanda sebagian negara di Asia Tenggara. Tidak hanya mencemarkan udara di dalam negeri namun kabut asap telah memasuki wilayah negara tetangga akibat terbawa angin.<sup>48</sup> Dampak paling besar dialami oleh negara-negara tetangga

---

<sup>48</sup> [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), diakses pada tanggal 12 Maret 2014

di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura yang menerima kiriman asap dari Indonesia.

Masalah lingkungan dapat menjadi sumber konflik politik antar negara-negara dan mampu berkontribusi terhadap kekerasan diantara negara-negara tersebut. Perubahan lingkungan mampu menciptakan konflik dalam bentuk perang, terorisme, diplomasi dan perselisihan perdagangan.<sup>49</sup>

Hubungan antara negara menjadi terganggu dan sempat mengalami ketegangan dengan munculnya protes keras dari Malaysia dan Singapura kepada Indonesia agar Indonesia bisa secepatnya mengatasi kebakaran hutan agar asap yang ditimbulkannya tidak semakin tebal. Selain itu, Brunei Darussalam dan Thailand juga mengalami imbas dari kabut asap yang terjadi di Indonesia. Walaupun intensitasnya lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Malaysia dan Singapura.

Menurut *United Nations Development Programme* -(UNDP), kabut asap pada tahun 1997 mengakibatkan individu-individu di Asia Tenggara mengalami kerugian 1,4 miliar dolar AS, khususnya biaya terhadap kesehatan jangka pendek. Lebih dari 40.000 orang dirawat karena penyakit pernapasan. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan 757 juta ton CO<sup>2</sup> dihasilkan oleh pembakaran hutan antara tahun 1997-1998.<sup>50</sup>

Kabut asap yang dihasilkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengakibatkan polusi atau pencemaran udara yang melewati batas-batas negara.

---

<sup>49</sup> Sean M. Lynn-Jones & Steven Miller, *Global Danger: Changing Dimensions of International Security*, (MIT Press, 1995), hal.144

<sup>50</sup> Asian Development Bank, <http://www.adb.org/documents/books/AEO/2001/aeo2010.asp>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Di satu sisi Indonesia menganggap bahwa faktor alam merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (kekeringan berkepanjangan / *el nino*) serta faktor ekonomi dalam mendukung kapasitas untuk mencegah kebakaran ditambah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atas aksi pembakaran lahan dan hutan tersebut.

Namun beda halnya dengan Malaysia dan Singapura yang menganggap bahwa kasus kabut asap ini adalah kurang seriusnya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Indonesia sehingga dampak yang ditimbulkan juga ikut dirasakan oleh negara Malaysia dan Singapura yang jelas sangat merugikan.

#### **D. Respon dan Tanggapan Negara-negara ASEAN Terhadap Kasus Kabut Asap Indonesia**

Kemelum kabut asap yang terjadi di Indonesia tidak hanya dirasakan di dalam negeri namun juga ikut dinikmati oleh negara tetangga salah satunya negara Malaysia. Protes keras yang dilayangkan Malaysia kepada Indonesia menjadi sebuah persoalan bagi Indonesia.

Kabut asap pertama kali hadir dan mengganggu aktifitas warga Malaysia pada bulan April 1983. Kemudian kekacauan itu berlanjut pada tahun 1990 dan puncaknya terjadi pada tahun 1997 ketika langit Malaysia ditutupi dengan kabut asap dari bulan Agustus sampai bulan November akhir tahun.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> David Glover & Timothy Jessup, *Indonesia's Fires and Haze : The Cost of Catastrophe*.1999, Institute of Southeast Asian Studies, hal.22

Sebanyak 13 kawasan mencatat indeks pencemaran udara (IPU) antara 101 hingga 158 yang berarti kualitas udara tidak sehat.<sup>52</sup> Beberapa kawasan yang mencatat IPU tidak sehat, berdasar laman Departemen Lingkungan Hidup Malaysia adalah Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, dan terparah tercatat di Kuala Selangor, Selangor dengan IPU 158.

Pemerintah Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengesahkan perjanjian di kawasan Asia Tenggara soal pencemaran asap lintas batas negara.<sup>53</sup> Selain itu mereka juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan asal Malaysia yang terbukti sebagai dalang pembakaran lahan dan menyebabkan polusi kabut asap ini.

Dampak yang dirasakan Malaysia dengan hadirnya kabut asap di wilayah mereka yaitu kualitas udara di beberapa daerah di Malaysia termasuk Bukit Klang yang padat penduduk semakin buruk. Ratusan sekolah yang berada di daerah tersebut terpaksa ditutup. Asap juga menyelimuti gedung parlemen Dewan Rakyat, tempat berlangsungnya pengambilan sumpah pejabat baru Malaysia.

Tuntutan Malaysia terhadap Indonesia untuk mengatasi kabut asap ditanggapi Indonesia dengan bijak. Pihak Indonesia berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara maksimal tanpa perlu adanya campur tangan dari negara lain.

---

<sup>52</sup> Kualitas udara di 13 wilayah Malaysia tak sehat akibat kabut asap, <http://surabaya.tribunnews.com/2014/03/13/kualitas-udara-di-13-wilayah-malaysia-tak-sehat-akibat-kabut-asap>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>53</sup> Malaysia desak Indonesia ratifikasi perjanjian kabut asap, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/423775-malaysia-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014



Namun Malaysia menganggap Indonesia tidak serius dalam menangani kabut asap ini setelah beberapa tahun ini. Kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan hampir tiap tahunnya meracuni udara di negara Malaysia. Malaysia protes karena mereka harus ikut merasakan bencana kabut asap yang berasal dari Indonesia tersebut.

Departemen Lingkungan Malaysia mengatakan bahwa kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi pada tahun 2006 lebih buruk untuk kesehatan manusia dibandingkan akibat kabut asap pada tahun 1997. Kualitas udara yang buruk ini tersebar di 32 wilayah Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menyatakan keadaan darurat di daerah sekitar Kuala Lumpur, setelah kabut asap tebal menyelimuti kawasan itu.

Selain memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, kabut asap ini juga mengakibatkan kematian bagi masyarakat Malaysia. Dalam beberapa kasus Indeks Polusi Udara (Air Pollution Index/API) mencapai 529 di Port Klang, pusat perkapalan penting di Malaysia dan 531 di Kuala Selangor. Tingkat API berada di atas 300 dapat dikategorikan berbahaya. Sementara 500 dapat memicu keadaan darurat. Pada Agustus 2005, kabut asap agak bersih di pantai barat tetapi di Kuala Lumpur API meningkat dari 321 menjadi 365.<sup>54</sup>

Di Malaysia, partai oposisi terbesar di Malaysia, Partai Tindakan Demokratis (DAP), berdemonstrasi di luar Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur pada bulan Oktober 2006. Partai itu mengatakan kabut asap ini merupakan ancaman bagi ekonomi dan kesehatan jutaan warga Malaysia. Tindakan yang

---

<sup>54</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/13/0102.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

dilakukan oleh Partai oposisi Malaysia secara tidak langsung mengartikulasikan bagaimana pendapat dan persepsi dari sebagian masyarakat Malaysia terhadap kabut asap yang terjadi. Dalam aksinya tersebut, Partai oposisi Malaysia menyerahkan petisi yang menuntut Indonesia agar mengambil langkah konkret guna menanggulangi asap.<sup>55</sup> Menurut Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik Malaysia, Lim Guan Eng, pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup komitmen untuk menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia.<sup>56</sup>

Sebelumnya, Malaysia terus memberikan tekanan kepada Indonesia agar melakukan tindakan cepat mengatasi kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan di Sumatera. Malaysia mendesak Indonesia untuk meratifikasi traktat ASEAN yang ditujukan untuk mengatasi kabut asap.<sup>57</sup>

Hal ini didukung dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak akan mengirim surat protes ke pemerintah Indonesia terkait kabut asap yang melanda negaranya akibat kebakaran hutan.<sup>58</sup> Malaysia menginginkan Indonesia bekerjasama mengambil langkah yang efektif dan menghukum siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan. Hal terpenting adalah bagaimana mengatasi pembakaran hutan yang terjadi.

---

<sup>55</sup> Malaysia Protes Kiriman Asap Indonesia, <http://www.dw.de/malaysia-protes-kiriman-asapindonesia/a-2935213>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>56</sup> *ibid.*

<sup>57</sup> Penanganan kabut asap akan dibicarakan Menlu se-ASEAN, <http://international.okezone.com/read/2013/06/29/411/829427/penanganan-kabut-asap-akan-dibicarakan-menlu-asean>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>58</sup> Ancaman Kabut Asap: Malaysia protes Indonesia, <http://www.kabar24.com/nasional/read/20130625/63/194337/ancaman-kabut-asap-malaysia-protes-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Aksi protes dari pihak Malaysia langsung dikabarkan oleh media internasional dan menjadi preseden buruk bagi Indonesia. Pemberitaan buruk yang menyalahkan Indonesia menimbulkan kekecewaan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menilai Singapura dan Malaysia tidak menjadi tetangga yang baik dengan menggembar-gemborkan masalah ke dunia.<sup>59</sup> Beliau mengatakan masalah asap ini sebaiknya dibicarakan bilateral saja. Pasalnya, terindikasi bahwa perusahaan Malaysia lah yang membakar hutan untuk membuka lahan.

Sejauh ini pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi bilateral dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap. Malaysia bersedia membantu Indonesia untuk memadamkan api dan menindak pelaku perusahaan jika terbukti perusahaan yang terlibat berasal dari Malaysia.

Selain itu Malaysia juga menghimbau ASEAN untuk menanggulangi permasalahan kabut asap ini secara bersama-sama. Namun Indonesia masih dianggap kurang serius dalam mengatasi kabut asap selama 11 tahun ini.

Malaysia menganggap kasus ini merupakan kasus serius dan meminta Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap yang telah ditandatangani bersama anggota ASEAN lainnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah Malaysia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil pendekatan konfrontatif terhadap

---

<sup>59</sup> Jero: Protes Asap Malaysia dan Singapura Bukan Tetangga, <http://www.merdeka.com/peristiwa/jero-protes-asap-malaysia-dan-singapura-bukan-tetangga-baik.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2014

pemerintah Indonesia karena ada kebutuhan yang lebih luas untuk memelihara hubungan mereka.

Tidak hanya Malaysia, kabut asap juga memberikan dampak terhadap negara Singapura. Singapura mengambil langkah yang lebih ekstrem untuk menegur Indonesia dalam menanggapi kabut asap yang telah menyelimuti wilayah negara mereka. Singapura lebih memilih membawa masalah kabut asap di tingkat dunia dengan mengangkat isu kabut asap Indonesia dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Oktober 2006. Hal ini mendapat protes dari pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara Indonesia-Singapura.

Seperti yang dikutip dari Detiknews, Singapura mengalami kabut asap terburuk dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.<sup>60</sup> Indeks Standar Polutan Singapura, PSI mencapai level 155 pada Senin, 17 Juni 2013 pukul 22.00 waktu setempat. Level ini melampau angka tertinggi pada tahun 2006 lalu-yakni 150.

Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, NES telah mengeluarkan peringatan bagi anak-anak dan para lanjut usia untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Mereka yang harus pergi ke luar ruangan diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.

Keadaan Singapura yang demikian membuat banyak turis yang kemudian mengubah jadwal liburan mereka karena mereka menganggap bahwa udara di Singapura sangat tidak bagus. Di Singapura, indeks standar polusi (PSI) pernah

---

<sup>60</sup> Kabut Asap kiriman dari Sumtera terburuk di Singapura dalam 7 tahun, <http://news.detik.com/read/2013/06/18/102856/2276511/1148/kabut-asap-kiriman-dari-sumatera-terburuk-di-singapura-dalam-7-tahun?991101mainnews>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

mencapai level kritis, yakni 400, yang berpotensi mengancam nyawa orang-orang sakit dan lanjut usia. Seperti yang diketahui bahwa Indeks Standar Polusi di atas 300 dapat dikategorikan sebagai “membahayakan”. Hal ini membuat pemerintah Singapura mengambil beberapa kebijakan supaya warganya tidak terganggu oleh kabut asap yang sedang terjadi di negaranya. Pemerintah Singapura memberikan bantuan khusus bagi warganya yang terpaksa menjalani perawatan medis akibat kabut asap.

Kabut yang diklaim sebagai kabut terparah sepanjang masa itu mengganggu sejumlah aktivitas warga. Sekolah terpaksa diliburkan dan sistem transportasi pun terganggu karena masalah itu.<sup>61</sup> Sektor pariwisata Singapura tak luput terkena dampak kabut asap pembakaran lahan gambut di Pulau Sumatera. Beberapa tempat wisata favorit di Singapura terpaksa menghentikan bisnis mereka sementara hingga kondisi udara membaik.<sup>62</sup> Objek wisata bianglala Singapura atau Singapore Flyer berhenti operasi sementara demi melindungi karyawan mereka yang sebagian besar bekerja di luar ruangan. Ditutupnya objek wisata ini berimbas pada bisnis-bisnis kecil di sekitarnya. Menurut salah seorang pemilik toko di dekat Singapore Flyer, pemasukannya anjlok hingga 80 persen. Akibat sepinya pengunjung, dia terpaksa menutup tokonya dua jam lebih awal.

Kabut asap yang melanda Singapura belum memberikan dampak serius bagi aktivitas penerbangan di Bandar Udara Changi yang terkenal sibuk. Namun,

---

<sup>61</sup> Singapura mulai keluhkan Kabut Asap Riau, <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/12/118553506/Singapura-Mulai-Keluhkan-Kabut-Asap-Riau>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014

<sup>62</sup> Kabut Asap bikin pariwisata Singapura semaput, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/422699-kabut-asap-bikin-pariwisata-singapura-semaput>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014

otoritas penerbangan sipil Singapura (CAAS) meningkatkan pemisahan aktivitas lepas landas dengan pendaratan demi menghindari insiden akibat kabut asap tebal. Menurut CAAS, hal ini dilakukan demi memastikan keselamatan dalam operasional penerbangan di Bandar Udara Changi. Walaupun aktivitas di Bandar Udara Changi masih beroperasi normal, namun sejumlah jadwal penerbangan mengalami sedikit penundaan akibat adanya kabut asap di Singapura dan Indonesia.

Dampak kabut asap yang dialami oleh Singapura mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan memicu aksi protes dari sebagian warga Singapura. Layangan protes dari Singapura pun terus berdatangan kepada Indonesia atas peristiwa kabut asap yang hampir terjadi setiap tahunnya.

Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, telah mengirimkan surat protes melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. Tak hanya melalui surat, komunikasi via telepon juga dilakukan oleh Menteri-Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Yaacob Ibrahim.<sup>63</sup> Singapura merupakan negara yang paling tegas untuk mendesak ASEAN, khususnya Indonesia untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Selain mendesak, Singapura juga memberikan bantuan yaitu turut menyediakan pesawat tempurnya yang telah dimodifikasi untuk membantu pemadaman. Selain itu, Singapura juga bersikeras agar kesepakatan tentang kabut asap segera diratifikasi oleh pihak Indonesia.

Protes keras dari Singapura juga ditanggapi oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang menganggap bahwa protes itu wajar adanya karena

---

<sup>63</sup> Terganggu Kabut Asap, Singapura Kirim Nota Protes ke Jakarta, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Singapura merasa keberatan dengan munculnya kabut asap di wilayah mereka yang mengganggu pernafasan warganya.<sup>64</sup>

Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memadamkan kebakaran lahan. Otoritas Indonesia mengatakan telah mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk mengatasi kebakaran lahan.<sup>65</sup> Namun pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Singapura, Vivian Balakrishnan menyalahkan kepentingan komersial Indonesia yang membakar hutan menimbulkan masalah lingkungan. Namun, pejabat Indonesia mengatakan investor Singapura dan Malaysia bertanggung jawab atas kebakaran. Hal ini dikarenakan perusahaan kelapa sawit Singapura yang berada di Indonesia juga ikut terlibat dalam pembakaran lahan.

Singapura yang ikut merasakan kerugian yang dialami Indonesia turut memberikan bantuan dalam memadamkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi. Singapura mengirimkan sebuah pesawat militer yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan.<sup>66</sup> Singapura juga meminta negara-negara ASEAN untuk memberikan sikap tegas terhadap masalah kabut asap. Singapura mendesak agar adanya tindak lanjut yang nyata dalam menangani kasus ini.

---

<sup>64</sup> [www.news.viva.co.id](http://www.news.viva.co.id), "Kabut Asap, Wajar Singapura Protes", diakses pada tanggal 12 maret 2014

<sup>65</sup> Kabut Asap di Singapura dan Malaysia capai level terparah, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/06/18/moksp-kabut-asap-di-singapura-dan-malaysia-capai-level-terparah/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

<sup>66</sup> Malaysia minta ASEAN bertindak soal asap, <http://www.tempo.co/read/news/2005/08/16/05565371/Malaysia-Minta-ASEAN-Bertindak-SoalAsap>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Brunei Darussalam sebagai salah satu negara yang berada satu wilayah dengan Indonesia, juga terkena imbas kabut asap dari Indonesia. Tetapi intensitas kabut asap yang diterima oleh Brunei Darussalam lebih sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Dalam menanggapi kasus kabut asap, Brunei Darussalam terkesan mengambil langkah yang lebih kooperatif terhadap Indonesia. Brunei Darussalam lebih menunjukkan untuk berkontribusi dalam setiap pertemuan yang membahas mengenai kabut asap guna mencari solusi bersama agar masalah ini dapat diselesaikan. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Sebagai bentuk rasa peduli sesama anggota ASEAN Brunei Darussalam juga menghadiri pertemuan lima Menteri Lingkungan Hidup di Riau. Tak hanya itu Brunei Darussalam juga ikut serta dalam KTT ASEAN dan sekaligus menjadi tuan rumah.<sup>67</sup> Di dalam pertemuan tersebut sepakat mengadopsi sistem baru untuk meningkatkan pemantauan kabut asap akibat kebakaran hutan. Kabut asap yang sebagian besar berasal dari kebakaran hutan untuk pembukaan lahan di Indonesia, pernah memicu ketegangan diplomatik, setelah kabut asap merembet Singapura dan Malaysia. Pemerintah Brunei Darussalam juga sepakat untuk membantu biaya operasional demi penanggulangan fenomena kabut asap ini.

Thailand juga ikut merasakan kiriman kabut asap dari Indonesia. Namun, intensitas ketebalan asap di Thailand jauh lebih sedikit dibandingkan Malaysia

---

<sup>67</sup> ASEAN sepakat adopsi sistem pengawasan kabut asap, <http://international.sindonews.com/read/2013/10/09/40/792598/asean-sepakat-adopsi-sistem-pengawasan-kabut-asap>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014



dan Singapura. Kabut asap juga mempengaruhi aktifitas sebagian masyarakat Thailand. Pemerintah Thailand memilih untuk membahas kabut asap ini di tingkat ASEAN dengan cara meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dan turut membantu dalam pendanaan untuk penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia.